

## ABSTRAK

Indonesia belum ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang PKL, hanya diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah salah satunya Perda Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dengan adanya Peraturan tersebut diharap PKL bisa tertata dengan rapi, akan tetapi masih ada PKL yang berjualan di badan jalan, trotoar, dan alun-alun yang menyebabkan kemacetan dan mengurangi keindahan kota. Padahal dalam Perda Nomor 02 Tahun 2013 Pasal 28 telah jelaskan bahwa PKL dilarang berjualan di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara dan trotoar. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. metode yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian yang diteliti. Dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang diperoleh secara langsung dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Sebagian besar data yang digunakan yaitu wawancara dan literatur yang berkaitan dengan PKL.

Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: Implementasi Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagian sudah terealisasi hal ini dibuktikan dengan PKL sudah menempati lokasi yang disediakan dengan jangka waktu yang ditentukan. Selain itu para PKL sudah mengetahui penetapan Perda. Namun masih ada PKL yang melanggar peraturan. Ditinjau dari *maṣlahah* dari sudut pandang Pemerintah terhadap implementasi Peraturan Daerah termasuk *maṣlahah ḥājiyyah* dan dari sisi PKL juga termasuk dalam *maṣlahah ḥājiyyah*. Karena untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia. Jadi dari tingkatan makna *maṣlahah ḥājiyyah* lebih diutamakan daripada *maṣlahah taḥsīniyyah*. Karena jika *maṣlahah ḥājiyyah* tidak dipenuhi maka akan berdampak pada salah satu lima aspek pokok, sedangkan *maṣlahah taḥsīniyyah* hanya pelengkap demi menata keberadaan PKL supaya lebih tertib dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Implementasi Perda, Pedagang Kaki Lima, *Maṣlahah*.

## ABSTRACT

Indonesia does not yet have a specific law that regulates street vendors, it is only strengthened by the existence of regional regulations, one of which is Pasuruan City Regional Regulation Number 02 of 2013 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. With this regulation, it is hoped that street vendors can be organized neatly, however there are still street vendors who sell on roads, sidewalks and squares which causes traffic jams and reduces the beauty of the city. In fact, Article 28 of Regional Regulation Number 02 of 2013 explains that street vendors are prohibited from selling in places where parking is prohibited, temporary stops and sidewalks. The aim of this research is to determine the implementation of Pasuruan City Regional Regulation Number 02 of 2013 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors, and a *Maṣlaḥah* Review of Pasuruan City Regional Regulation Number 02 of 2013 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors.

The type of research used is field research with a normative juridical approach. The method is carried out by jumping directly into the research object being studied. By searching and collecting data obtained directly in the field. This research is descriptive-analytic in nature, namely research by collecting data according to the actual data, then the data is compiled, processed and analyzed to provide an overview of the existing problem. Most of the data used are interviews and literature related to street vendors.

The results of this research are as follows: The implementation of Pasuruan City Regional Regulation Number 02 of 2013 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors has been partially realized. This is proven by the street vendors occupying the locations provided within the specified time period. Apart from that, street vendors already know about the stipulation of the Regional Regulation. However, there are still street vendors who violate the regulations. Judging from the *maṣlaḥah* from the Government's point of view regarding the implementation of Regional Regulations, it includes *maṣlaḥah ḥājiyyah* and from the side of street vendors it is also included in *maṣlaḥah ḥājiyyah*. Because it is to maintain and maintain basic human needs. So, from the level of meaning, *maṣlaḥah ḥājiyyah* takes precedence over *maṣlaḥah taḥṣīniyyah*. Because if *maṣlaḥah ḥājiyyah* is not fulfilled it will have an impact on one of the five main aspects, while *maṣlaḥah taḥṣīniyyah* is only a complement to organize the existence of street vendors so that it is more orderly and does not disturb the comfort of the surrounding community.

**Keywords:** Implementation of Regional Regulations, Street Vendors, *Maṣlaḥah*.